PEMALSUAN IDENTITAS ANAK DALAM AKTA OTENTIK OLEH KELUARGA KORBAN AKIBAT PEMERKOSAAN

Nurul fakhriyah¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas hukum, Universitas 17 agustus 1945 surabaya
Email: nurul.fafa2001@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jaminan Negara terhadap Status Anak akibat pemerkosaan, tidak ada seorangpun yang menginginkan menjadi korban dari perbuatan keji seseorang, akibat dari perbuatan keji berupa pemerkosaan tak jarang korban mengalami trauma, kehamilan. Lahirnya seorang anak tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi korban untuk mengemban status baru menjadi seorang ibu dari anak yang tak diinginkan sebelumnya. Setiap orang dilindungi serta diberikan hak oleh Negara mulai dari dalam kandungan sampai ia menutup usia. Meskipun korban dari pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi tetapi tidak jarang korban tetap mempertahankan kandungannya hingga anak akibat dari pemerkosaan lahir di dunia. Lahirnya anak tentunya juga lahir pula hak-haknya dari anak, kewajiban orang tua atas pemberian terhadap status identitas anak yang telah dijamin oleh Negara sepatutnya dijunjung tinggi serta di hormati untuk melindungi harkat dan martabat anak sebagaimana hal itu dijelaskan dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak, ketika hak-hak anak direnggut oleh keluarga korban akibat pemerkosaan disinilah terdapat konflik terhadap aturan yang mengaturnya dengan fakta yang terjadi dimana anak kehilangan jati dirinya akibat keegoisan dari para pihak. Anak berhak untuk memiliki identitas terhadap dirinya sejak ia dilahirkan di dunia. Pada umumnya anak akibat dari pemerkosaan hak untuk mengetahui identitas dirinya mulai dari siapa orang tua kandungnya, biasanya disembunyikan guna untuk menutupi aib bagi keluarga korban pemerkosaan. Permasalahan ini tentunya akan berakibat fatal untuk masa kini dan mendatang sebab Akta Otentik Merupakan surat yang biasa dipergunakan bagi kehidupan manusia. Hal ini diabaikan oleh pihak keluarga korban, padahal tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari segi pemalsuan Akta Otentik sebagaimana diancam Pidana Penjara Paling Lama Enam Tahun, dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana merupakan Undang-Undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Hak Anak Akibat Pemerkosaan, Pemalsuan identitas anak, Dampak.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the state guarantees rape child status, that no one wants to be the victim of one's vile act, the result of rape is not uncommon in trauma, pregnancy. The birth of a child must have been a heavy responsibility for the victim to assume a new status as a mother of an unwanted child. Everyone is protected and granted rights by the state from the womb until it recovers age. While a rape victim is allowed to have an abortion, it is not uncommon for a victim to keep her pregnancy in check until the child resulting from rape is born in the world. The birth of the child is certainly born as well as the rights of the child, the parental obligation to give to the identity of the child which is guaranteed by the state should be highly valued and respected to protect the dignity and dignity of the child as it is defined by the legislation on child protection, when the rights of the child are taken away by the family as a result of rape, there isa conflict between the rules and the fact that the child has lost his identity as a result of the selfishness of the party. The child has a right to have an identity on him since he was born in the world. The child in general from the rape right to know his or her identity starting with his or her biological parents, usually hidden in order to cover up the shame of the rape victim's family. This would surely be fateful for the present and future because authentic

deeds are the letters used for human life. It is ignored by the victims' families, whereas it is a violation of the penal code on the part of authentic deed forgery as long as the maximum prison penalty of six years is threatened, and it is charged with 2016's second amendment act on child protection.

Keywords: child rights to rape, child forgery , impact .

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah kejadian sosial yang sering terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat. hal ini, perihal tentang masalah tindak pidana sepertinya terlihat terus menerus terjadi dan tidak berkurang baik dilihat dari karakter perbuatannya jika di nilai dari segi jumlahnya, bertambahnya perilaku tindak pidana tentunya mengakibatkan masyarakat dan pemerintah merasa keresahan.

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari sebuah ajaran, tindak pidana selalu ada dan melekat dalam diri masyarakat, oleh karena itu dapat di simpulkan bahwasannya tindak pidana sering terjadi setiap hari, bulan, tahun dan terus mengulangi tindakan tersebut meskipun tidak dilakukan oleh orang yang sama atau bahkan orang yang sama yang melakukan tindakan yang serupa atau yang berbeda seperti halnya musim yang berganti setiap tahunnya. Adapun fungsi dari Hukum Pidana yaitu sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan dan bisa memberikan saran yang benar. Maka pelaksanaan pembangunan hukum terutama dalam segi Hukum Pidana harus ditingkatkan dan di upayakan semaksimal mungkin agar terarah dan terpadu agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat karena dalam perkembangan jaman saat ini tindak pidana kejahatan berupa kekerasan seksual yang semakin meningkat. Oleh karena itu alasannya dibentuknya sebuah aturan Hukum Pidana agar supaya dapat dijadikan sebagai suatu penegakan hukum khususnya dalam bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan.

Terdapat berbagai bentuk perbuatan pidana yang terjadi, salah satunya yaitu berupa kejahatan terhadap pemalsuan, hal ini biasanya terdapat keterangan yang tidak benar/dimanipulasi sehingga olah-olah benar dan dapat mengakibatkan orang lain mempercayainya padahal isi dari keterangan tersebut bertentangan dengan apa yang sebenarnya.

1. Macam-macam bentuk kejahatan dari tindakan pemalsuan apabila di rinci menjadi 4 bagian, yaitu:

2. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memberikan sumpah palsu kepada orang lain
3. Kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu seseorang dengan mengedarkan uang palsu
4. Kejahatan dengan memanipulasi pernyataan dalam surat dengan cara memalsukan materai dan memanipulasi barang dengan merek yang tidak asli
5. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan/ mengambil keuntungan dalam tindakannya dengan melakukan pemalsuan surat Akta Otentik

Dalam keadaan masa sekarang terjadi perkembangan tindak pidana pemalsuan yang berbagai macam tindakannya yang tak lain yaitu tindak pidana pemalsuan terhadap surat Akta Otentik, pemalsuan ini mengalami perkembangan yang sangat melesat sebab objek yang dipalsukan berupa Akta Otentik, sedangkan Akta Otentik mempunyai dimensi yang sangat luas.

Akta Otentik merupakan surat yang tidak terlepas dari hubungan dengan aktivitas masyarakat pada kehidupan sehari-harinya. Selain perkembangan tindak pidana terhadap pemalsuan Akta Otentik hal ini juga sering terjadi pada pemalsuan identitas seseorang. Meningkatnya kasus tindak pidana ini tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar dari pelaku, sebagian dari masyarakat masih beranggapan bahwasannya perbuatan memalsukan dokumen penting berupa Akta Otentik yang tak lain yaitu Akta Kelahiran anak dianggap hal yang biasa terjadi dan sudah lumrah dikalangan masyarakat. hal ini kemungkinan dikarenakan masyarakat tidak melihat sanksi yang didapatkan bagi pelaku sehingga menganggap enteng peristiwa tersebut.

Tindakan seperti pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Indonesia terutama pada Hukum Pidana dan apabila hal ini berdampak kepada orang lain yang mengalami kerugian maka akan mengakibatkan masyarakat hilang kepercayaannya kepada surat dan Akta Otentik. Tindakan masyarakat yang menganggap biasa perbuatan tersebut sebenarnya telah menyerang kepercayaan masyarakat terhadap Hukum Indonesia.

Status atau identitas adalah bentuk jati diri seseorang, akibat dari tindakan pemalsuan identitas dalam Akta Otentik maka mengakibatkan seseorang kehilangan jati dirinya karena telah dipalsukan. Oleh karena itu dapat kita gambarkan bagaimana besarnya pengaruh dari kejahatan tersebut serta seberapa besar seseorang mengalami kerugian yang diderita oleh

korban baik secara materiil maupun secara immaterial. Oleh sebab itu maka hal tersebut di upayakan agar tidak terjadi supaya tidak merusak citra bangsa Indonesia.

Namun faktanya tindak pidana pemalsuan terhadap identitas anak dalam Akta Otentik yang dilakukan tak lain yaitu oleh keluarga dari anak yang menjadi korban akibat pemerkosaan, pemalsuan ini dilakukan dengan cara identitas anak dari korban akibat pemerkosaan dialihkannya status anak ke dalam Kartu Keluarga orang lain. Hal ini sudah biasa terjadi dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila dalam proses pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur pengangkatan anak yang sebagaimana ditetapkan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. tindakan yang ditempuh oleh korban dan keluarga biasanya bertentangan dengan Hukum Pidana atas tindakannya yang memasukkan data anak ke dalam kartu keluarga orang lain, yang tak lain yaitu:

- 1) Anak di adopsi secara ilegal oleh kakak korban
- 2) Anak di adopsi secara ilegal oleh sepupu korban
- 3) Anak di adopsi secara ilegal oleh orang tua korban

Hal ini tentunya mengakibatkan ada perubahan identitas anak yang awalnya identitas aslinya sebagai anak kandung beralih menjadi hubungan antara saudara dari ibu dengan keponakan dan bahkan juga bisa menjadi adik. Cara untuk melakukan pengangkatan anak melalui jalur Pengadilan Negeri maupun jalur Pengadilan Agama. Dalam proses untuk melakukan sebuah tindakan hukum berupa pengangkatan anak secara benar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka seseorang harus memiliki dokumen hukum, dokumen hukum ini merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi pada kehidupan anak di dalam keluarga angkatnya bahkan hal ini dapat berdampak sampai sejauh mungkin apabila keluarga angkatnya memberikan anak angkatnya bagian dari kewarisannya, selain itu dalam mengangkat anak tidak hanya tentang dokumen resmi maupun kewarisan saja tetapi juga bagaimana tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

keputusan dari Pengadilan Negeri terhadap keputusan seseorang yang ingin mengangkat seorang anak, merupakan peristiwa yang sangat penting karena keputusan dari tindakannya Pengadilan tentunya melihat kewajiban dari orang tua untuk memenuhi hak-hak anak angkatnya agar mendapatkan perlakuan yang sama layaknya anak pada umumnya seperti halnya mendaftarkan anak dalam Pencatatan Kantor Catatan Sipil agar anak juga

memperoleh sebuah Akta Kelahiran yang tertulis secara detail peristiwa apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah pengangkatan anak tersebut terjadi (dolot A. Bakung 2017)

Dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan macam-macam Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya kutipan Akta Kelahiran dan pengesahan anak memuat jenis peristiwa penting (Pemerintah and others 2019). Karena, Setiap anak memiliki hak untuk tetap bertahan untuk melangsungkan kehidupannya untuk masa yang akan mendatang melalui tumbuh kembang serta ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melindungi diri dari tindakan kekerasan serta diskriminasi, hal ini dilakukan agar tetap terus terjaga keutuhannya (Lestari 2017). hal tersebut tertuang secara tegas Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan dasar filosofis untuk memberikan suatu perlindungan bagi anak. Salah satu bentuk cara orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak yaitu dengan mencatatkan kelahiran anak agar anak mendapatkan Akta Kelahiran sebab hal ini merupakan Hak Asasi Manusia. Dilakukannya hal ini bukan hanya tanggungjawab dan kewajiban orang tua dari anak tetapi juga menjadi tanggungjawab dan kewajiban bagi Negara dan Pemerintah sebagaimana yang tertuang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di alinea ke-empat di dalamnya terdapat perlindungan dari Negara kepada Masyarakat Indonesia dengan cara menjamin kehidupan masyarakat sejahtera melalui Pendidikan agar Masyarakat Indonesia menjadi penghuni Bangsa yang cerdas, dan tidak dapat di hilangkan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab Negara dilakukan dengan upaya memastikan bahwa anak Indonesia sudah mempunyai identitas diri berupa Akta Kelahiran (Yenny AS 2018). Negara bersama Pemerintah, Masyarakat, orang tua harus bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak sebagai kelangsungan hidup anak secara utuh. Hal yang paling sederhana untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua minimal menjalankan hak dasar dari anak seperti halnya hak sipil dengan mendapatkan Pencatatan Kelahirannya.

Terjadinya berbagai kasus perkosaan terhadap perempuan yang telah dewasa tentunya mendapatkan resiko deskriminasi dari lingkungan sosial sebab masyarakat

menganggap bahwasannya terjadinya peristiwa tindak kejahatan kekerasan seksual tidak terpas dari cara berinteraksi antara korban dengan pelaku. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya terjadinya peristiwa tersebut akibat dari faktor lingkungan sosial dari pelaku kejahatan dan juga lemahnya terhadap penegakan hukum yang masih kurang maksimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun sebagian pihak korban telah mendapatkan keadilan dengan memutuskan tuntutan hukuman yang berat bagi pelaku, namun korban tetap harus mendapatkan penanganan secara manusiawi sebagai hak sosial seperti ganti rugi, pemulihan trauma dan mendapatkan pengembalian harkat dan martabat sebagai wanita. sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, hal ini adalah bentuk perlindungan terhadap wanita (Pratama and others 2020).

Adapun kesalahan korban akibat pemerkosaan yaitu:

- 1) diam, dan menerima keadaan yang telah menyimpannya
- 2) Tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib
- 3) Takut terhadap ancaman pelaku sehingga menimbulkan trauma
- 4) Menganggap keadilan sulit untuk didapatkan untuk korban

Menurut kriminologi hankristuti hankrisnowo mengemukakan (dalam buku abdul wahid dan muhammad irfan), mengemukakan bahwa, Dapat dimengerti bahwa menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang Wanita, Proses Peradilan Pidana yang rumit akan sulit untuk dikatakan dapat membantu korban. Penderitaan korban bertambah lagi misalkan, dalam proses pemeriksaan perkara Di Pengadilan, yang sifatnya tidak privasi dan korban akan di perlihatkan di dalam sidang sehingga hal itu tentunya akan menimbulkan peristiwa yang membuatnya trauma dan memalukan ketika harus diperlihatkan korban didepan Sidang Pengadilan....(Sangki 2012).

Lahirnya seorang anak dari orang tua yang menjadi korban akibat kekerasan seksual tentunya memiliki hak yang sama seperti halnya anak pada umumnya dengan memiliki identitas atas dirinya, identitas orang tuanya seperti halnya yang tertuang secara jelas dalam Pasal 28 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 2016). Maka dari itu sangat penting sekali dokumen atau bukti sah mengenai identitas dalam pencatatan Kelahiran

Anak sebagai sebuah wujud pengakuan Negara terhadap adanya anak di dunia, identitas pribadinya dari segi keperdataan maupun dari segi Kewarganegaraan seseorang sebagai kebutuhan dasar anak yang memiliki manfaat yang luas bagi anak dalam pembuatan Ijazah dll.

Proses Peradilan Pidana yang sulit untuk mendapatkan sebuah keadilan bagi korban dan anak membuat keluarga korban menempuh jalur yang bertentangan dengan hukum baik dari segi Hukum Pidana maupun perlindungan anak serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kondisi yang terdesak dengan keadaan yang tidak memadai untuk menempuh jalur hukum sehingga keluarga korban memilih jalur yang sederhana demi kemaslatan anak tetap mendapatkan Pendidikan dan salah satu prasyarat untuk menempuh Pendidikan yaitu dengan memberikan dokumen penting perihal identitas orang tua dan anak. Namun yang menjadi permasalahan hukum pemikiran masyarakat yang masih awam atau memang sengaja mengabaikan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga muncul dari benak pikiran keluarga korban akibat pemerkosaan untuk membuat identitas palsu dikarenakan sebagian orang menganggap pemalsuan identitas tersebut dirasa efektif dan tidak menguras waktu dengan mencari identitas ayah biologisnya. Sedangkan melalui pengurusan Akta Kelahiran anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Buku nikah
- 2) Kartu keluarga
- 3) Kartu tanda penduduk orang tua/KTP
- 4) Surat keterangan lahir dari orang yang membantu kelahiran anak

Dalam kelahiran anak akibat pemerkosaan tidak dapat memenuhi sebagian persyaratan Dipoint Nomor 1 dikarenakan tidak ada pernikahan sebelumnya antara ibu kandung dengan ayah biologisnya. Anak yang berstatus anak luar kawin dapat memiliki akta kelahiran tetapi hanya mencantumkan identitas ibu kandungnya yang mana dalam hal ini tidak tercantum identitas ayah kandungnya. Namun ketika diberlakukan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat penjelasan bahwasannya anak yang dilahirkan diluar perkawinan selain ia memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung beserta keluarga dari ibunya, anak tersebut juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya dengan catatan selagi hal itu dibenarkan oleh ayah biologisnya serta dapat

dibuktikan berdasarkan hasil dari uji tes DNA dan menurut hukum mempunyai hubungan darah (P and Konstitusi 2012). Namun apabila ayah biologisnya tidak mengakui anak tersebut tentu membuat kesulitan untuk meminta sebuah pertanggungjawaban. oleh karenanya Sebagian masyarakat menganggap jalur pembuatan akta diluar perkawinan tidak juga efektif dikhawatirkan anak akan menanyakan identitas ayah biologisnya ketika sudah beranjak dewasa, alasan mengapa tidak tercantum dalam akta kelahirannya. Akta kelahiran anak luar kawin yang tidak sama dengan akta kelahiran anak pada umumnya tentunya dapat memberikan ruang bagi anak untuk mempertanyakan identitas ayahnya yang tidak tertera dalam akta kelahiran. sehingga hal ini dapat memberikan kesan buruk bagi psikologi ibu dan anak.

Adapun alasan dalam melakukan penelitian ini yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut pada Pasal 68 dimana Pasal tersebut didalamnya telah dijelaskan beberapa hal yang memuat Tentang Pencatatan Sipil yang tak lain menjelaskan peristiwa penting dalam pembuatan akta, baik itu pengangkatan anak maupun pembuatan akta kelahiran serta melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Tentang Pemalsuan Identitas Anak dalam akta otentik. Dalam kasus ini terdapat adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena isi dalam Undang-Undang tidak dijalankan pada semestinya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP.

Berdasarkan studi yang relevan yang digunakan peneliti dalam jurnal ini, peneliti merumuskan formulasi masalah, yaitu Apa akibat hukumnya pemalsuan terhadap identitas anak dalam Akta Otentik dan Bagaimana jaminan Negara terhadap status anak akibat pemerkosaan di tinjau dari Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset Hukum Normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian supaya mendapatkan sebuah aturan hukum yang sesuai sebagaimana tentang aturan-aturan hukum ataupun pendapat hukum agar bisa menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum ini ketika ingin memecahkan masalah maka dibutuhkannya beberapa pendekatan sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Rachman 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum pemalsuan terhadap asal usul anak akibat pemerkosaan

Terdapat beberapa akibat hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh keluarga korban dan beserta orang yang turut serta untuk menyukseskan tindakan pidana atau pelanggaran administratif seperti halnya dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang sanksi keluarga korban yang dengan sengaja menyuruh orang lain agar dibuatkan Akta Otentik sebagaimana yang diinginkan oleh keluarga korban, yang awalnya putri dari ibu (B) beralih menjadi putra/putri dari bapak (A) dan ibu (C) dengan bantuan Perangkat Desa. Hal ini tentunya dapat dikenakan beberapa Sanksi Pidana diantaranya:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) & (2) Juncto Pasal 264 ayat (1) & (2) dan Pasal 266 ayat (1) Tentang Pemalsuan Surat Akta Otentik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun hukuman yang diberikan kepada orang yang memalsukan sebagaimana menurut KUHP seseorang yang diketahui benar adanya telah melakukan perbuatan tersebut maka sesuai dengan ketentuan hukum apabila pelaku memenuhi syarat subjektif tersebut maka dikenai Pertanggungjawaban Pidana. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mengurus dan membantu kepentingan warga desanya atau bisa dikenal dengan panutan Desa yang telah ditunjuk sebagai orang yang diberikan kepercayaan dari masyarakat yang benar-benar mampu secara rohani dan jasmani menjadi Kepala Desa. Namun apabila ternyata pemimpin Desa yang mengkhianati Peraturan Undang-Undang atau tidak taat hukum maka dengan semestinya Kepala Desa/Perangkat Desa dikatakan sebagai pelaku

tunggal sebab secara Undang-Undang Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan Warga Desa seperti Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.

Kepala Desa/ Perangkat Desa ketika mengurus akta kelahiran ia mengiyakan permintaan dari keluarga korban selaku orang yang menyuruh untuk dibuatkan Akta Otentik sebagaimana yang keluarga korban inginkan. Perbuatan keluarga korban mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Inisiatif untuk berkehendak membuat Akta Otentik sebagaimana isinya sesuai dengan yang diinginkan yang awalnya berstatus keponakan beralih menjadi anak kandung
- b. Memberikan keterangan yang bertentangan dengan aslinya
- c. Pejabat Kepala Desa mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar adanya sehingga keluarga korban menyampaikan fakta yang terjadi dan apa yang diinginkan
- d. Perangkat Desa telah mengetahui tentang peristiwa asli dibalik pernyataan akta kelahiran tersebut. maka ia layak dipidana akibat lahirnya Akta Otentik palsu .

Maka oleh karena itu perbuatan keluarga korban yang menyuruh memasukkan data-data palsu dan dipenuhi permintaan dari keluarga korban oleh Kepala Desa/ Perangkat Desa, maka Kepala Desa/Perangkat Desa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana mestinya dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP

Dalam contoh perkara yang serupa yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo maraknya terjadi kasus pemalsuan Akta Kelahiran anak diluar perkawinan . seorang anak dari akibat pemerkosaan yang menjadi korban pemalsuan identitas oleh keluarga sendiri dengan cara menyuruh Kepala Desa/ Perangkat Desa untuk memasukkan data anak ke dalam Kartu Keluarga orang lain sehingga menjadi berubah status anak dari keponakan menjadi anak kandung kakak korban. Hal ini menjadi permasalahan sebab menitipkan identitas anak kepada Kartu Keluarga orang lain yang mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban orang tua kepada orang lain misalkan perihal waris, nasab sebagai akibat hukum bagi anak. Sesuai dengan peristiwa tersebut maka diancam dengan Pidana Penjara paling lama 7 Tahun sebagaimana dalam Pasal 266 KUHP (Hermawati 2020).

Akibat Hukum Pemalsuan Asal Usul Anak Dalam Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Selain itu, akibat hukum dari pemalsuan asal usul anak dalam akta otentik juga terdapat dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana hal ini yang menjelaskan bahwasannya akta kelahiran memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang kuat yang didalamnya tertera peristiwa penting atas kelahirannya anak sebagai warga negara indonesia. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Pengubahan dari akta kelahiran dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: “ bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta”.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dengan jelas kata “sengaja” oleh karena itu maka perbuatan dari keluarga korban dapat memenuhi bunyi dari Undang-Undang tersebut sebab telah jelas mengetahui bahwasannya identitas anak itu “bukan” anak kandungnya tetapi keponakannya dan sengaja mengaburkan identitas orang tuanya demi kepentingan anak untuk memenuhi syarat menempuh pendidikan.

Hal ini dilakukan oleh keluarga korban sebab proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin menempuh berbagai macam tahapan yang kemungkinan besar dianggap oleh keluarga korban sulit untuk dilaksanakan dan banyak pertimbangan yang dipikirkan mulai dari sanksi sosial tentang label anak zina dll. Karena dalam pembuatan akta apabila memenuhi persyaratan yang sebagaimana mestinya maka keluarga korban harus Menjelaskan bahwasannya anak lahir tersebut merupakan anak diluar perkawinan sebagai cara untuk memperjelas nasab anak dan hal ini merupakan hal yang penting.

Asal usul dari kelahiran anak dapat dilihat dari akta kelahirannya anak selagi akta kelahiran anak tersebut tidak dipalsukan, karena dengan akta kelahiran maka identitas anak diketahui misalnya anak dari bapak A dan ibu B . hal ini benar dianggap penting dan dilindungi oleh hukum sebab peristiwa ini berakibatkan dikemudian hari ketika anak itu dewasa ia dapat menuntut haknya dalam hal hak kewarisan dari orang tuanya. Bukti bahwasannya memang

benar akta kelahiran anak diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil yang salah satunya memiliki fungsi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Hal ini ditetapkan guna untuk mendapatkan semacam akta kelahiran agar seseorang memiliki kedudukan dan status hukum sebagai akta otentik. Selain itu akta otentik juga berguna agar keberadaan seseorang terlihat dan diakui oleh negara sebagai data dan informasi untuk negara supaya dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan, menunjang bagi data perencanaan pembangunan dan pengawasan serta pengendalian.

Prosedur pembuatan akta kelahiran anak di indonesia

Tata cara untuk membuat sebuah akta kelahiran anak di indonesia menurut peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Warga Mengisi formulir permohonan terlebih dahulu
2. sertakan bukti Surat keterangan lahir dari bidan/dokter/surat keterangan lahir dari desa/lurah
3. Foto copy kutipan akta perkawinan orang tua anak
4. Foto copy KTP-El kedua orang tua anak
5. Foto copy KTP-El (dua) orang saksi yang dengan jelas menyaksikan kelahirannya anak tersebut

Selain itu, dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan anak sah ada perbedaan, hal ini terlihat dari tata cara pembuatan akta lahir dari anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka persyaratannya sebagai berikut:

1. Warga Mengisi formulir permohonan terlebih dahulu
2. Sertakan Surat keterangan lahir dari bidan/dokter/surat keterangan lahir dari desa/lurah
3. Foto copy KK dan KTP-El bagi yang menemukan anak tersebut
4. Berita acara pemeriksaan kepolisian sebab hal ini harus diusut oleh pihak yang berwajib

5. Foto copy KTP-El (dua) orang saksi yang menemukan anak tersebut/menyaksikan kelahiran anak

Meskipun sebagian orang menganggap bahwasannya dalam pembuatan akta kelahiran anak diluar perkawinan harus menyertakan kutipan akta nikah orang tuanya, sedangkan anak luar kawin orang tuanya tidak melaksanakan perkawinan sehingga tak jarang orang mengambil jalur yang salah dengan membuat akta kelahiran anak dengan menyertakan buku nikah dari orang lain agar anak tetap mendapatkan akta kelahiran. Padahal dalam pelaporan kelahiran anak yang tidak menyertakan akta nikah maka pencatatan kelahirannya tetap dilaksanakan dengan catatan akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu kandungnya saja dan apabila ingin memperoleh nama ayah biologisnya tercantum dalam akta kelahiran maka dibutuhkan penetapan pengadilan (Lahati and Suleman 2020).

Akibat Hukum Pemalsuan Asal Usul Anak Dalam Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Akibat hukum yang alami oleh seseorang sesuai dengan KUHP, administrasi kependudukan, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tak jarang ibu yang mengalami peristiwa hamil diluar perkawinan dan merasa panik sehingga mengambil tindakan yang salah dengan mengubah identitas dari anak kandungnya. Perubahan ini tentunya memberikan efek bagi keduanya, ibu terlepas dari tanggung jawabnya sedangkan anak tidak mendapatkan nasab sebagai anak dari ibu kandungnya. Hal ini dianggap merugikan sehingga apabila dikenakan hukuman maka ibu tersebut dapat dipidana atas dasar pemalsuan data sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya dalam peristiwa pengangkatan anak maka anak yang diangkat tersebut tidak terputus hubungan darah antara ayah biologisnya dengan anak biologisnya. Sebagaimana hal ini juga dibenarkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “ setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah bahwasannya pemisahan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak”

Hal yang hampir banyak terjadi di kalangan masyarakat korban dan keluarga korban yang memindahkan identitas anak menjadi anak dari kakak kandung (kakak korban pemerkosaan) untuk menutupi jejak ayahnya, maka oleh karena itu ibu dan kakak tersebut melakukan pemalsuan terhadap identitas asli dari anak dengan tujuan supaya anak tidak bisa mengetahui identitas asli orang tua kandungnya terutama sang ayah. Dalam perkara kasus ini maka korban dan kakak korban dikenakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni “ setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)....” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.,00 (seratus juta rupiah)”. Selain itu masih terdapat Pasal lain yang mengincar perbuatan dari korban dan kakak korban tersebut seperti halnya dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP Tentang Menggelapkan Asal-Usul anak diberikan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan masih ada lagi Pasal yang dapat dikenakan bagi kakak korban dalam Pasal 278 KUHP Tentang Pengakuan Anak yang bukan anak kandungnya/ pengakuan anak palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Perbuatan yang dilakukan atas dasar agar anak tidak mengetahui siapa ayahnya apabila hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang maka keputusan dari pengadilan akan memberikan hak asuh anak tersebut kepada pihak sang ayah biologis anak sebab yang berhak atas hak asuh anak adalah ayah dan ibunya. Adapun orang yang diberikan hak asuh anak harus dapat memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 2 huruf (b) sebagaimana untuk melaksanakan perlindungan bagi anak maka dilakukan dengan cara yang berpedoman pada Pancasila serta aturan tentang hak-hak anak sebagaimana sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kekerasan terhadap anak
- b. Orang tua harus mengedepankan kepentingan yang sekiranya baik untuk anak
- c. Orang tua tidak boleh merampas Hak hidup anak, dan harus menyejahterakan anak agar tetap berkembang selayaknya anak pada umumnya
- d. Orang tua harus mendengarkan dan menghargai pendapat anak

Jaminan Negara Terhadap Korban Dan Status Anak Akibat Dari Pemerkosaan

Dalam pembahasan sub bab ini akan ditunjukkan secara rinci bagaimana seharusnya jaminan terhadap status anak akibat pemerkosaan ditinjau dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dianalisa sesuai dengan rasa keadilan serta perlindungan atas hidup orang, dan pandangan hukum lainnya.

Kewajiban seseorang untuk saling menghormati, memenuhi dan juga melindungi hak asasi manusia merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh dikhianati oleh suatu negara sebab hal ini merupakan hak-hak warga negara indonesia untuk mendapatkan perlindungan diri dari warga negara sebagai kepentingan dalam hidup umat manusia oleh karena itu maka dibutuhkannya sebuah aturan hukum.

Melihat dari segi jaminan negara terhadap anak atas peristiwa yang dialaminya Tentang Pemalsuan Terhadap Akta Otentik dengan mengaburkan identitas orang tua anak melalui bantuan Kepala Desa/Perangkat Desa maka dalam segi hukum pidana, hukum harus sebuah keadilan bagi orang, memberikan manfaat, serta kebahagiaan dan juga menjamin agar orang mendapatkan hak-haknya sebagai wujud bantuan negara sebagai hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum terhadap pemenuhan hak identitas anak akibat pemerkosaan jika dilihat dari kasus yang disinggung maka kakak korban sebagai orang yang menyuruhlakukan perbuatan pidana, Kepala Desa/Perangkat Desa sebagai pelaku sebab ia memiliki kewenangan akan hal penerbitan akta/ pengurusan akta kelahiran anak dan ia mengiyakan permintaan dari keluarga korban sehingga terjadi perbuatan pidana pemalsuan identitas/data anak. Alat yang dipakai berbuat yaitu akta kutipan nikah, kartu keluarga. Sanksi tentang pengenaan bagi perbuatan Kepala Desa diberikan sanksi berupa penjatuhan sanksi moral, hukuman disiplin, karena telah memberikan pernyataan yang palsu/mendukung perbuatan keluarga korban atas dasar saling pengertian.

Penegakan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak Akibat Pemerkosaan

jika dilihat dari segi penegakan hukum yang kurang optimal sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat dapat dibentuk apabila masyarakat itu sendiri merasa keadilan bagi dirinya.

Berikut Tentang Sistem Pidanaan dalam tindakan Penyertaan dalam Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP. Tindakan Penyertaan dalam tindak pidana

sebagaimana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tindakan penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Pembuat/ pelaku atau biasa di kenal dader sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari:
 - a. Pelaku dalam tindak pidana (*pleger*)
 - b. Seseorang Yang menyuruhlakukan perbuatan pidana (*doenpleger*)
 - c. turut serta dalam melakukan tindak pidana (*madepleger*)
 - d. Penganjur untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

2. Dari hal yang sebutkan di atas, maka apabila di uraikan secara jelas Maka sebagai berikut:
 - a) Pelaku tindak pidana (*plegen*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya apabila diuraikan dapat memenuhi unsur-unsur Dalam delik sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. disini yang menjadi pelaku yaitu keluarga korban yang melengkapi berkas-berkas pembuatan akta palsu.

- b) Orang yang menyuruhlakukan perbuatan pidana (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah orang yang memerintahkan (kakak korban) melalui perantara/bantuan dari orang lain (Perangkat Desa).Jika lihat dari latar permasalahan yang menjadi perantara yaitu Perangkat Desa. Sebab Perangkat Desa yang memenuhi unsur-unsur pada *Doenplegen*: Alat yang dipergunakan adalah manusia, jika dilihat dari segi subyeknya Asisten Perangkat Desa yang dijadikan sebagai perantara bagi keluarga korban untuk memproses pembuatan akta kelahiran yang dipalsukan terhadap isinya, Maka unsur ini dapat dipenuhi.

Alat yang dipakai berbuat, akta kutipan nikah, kartu keluarga Seseorang yang digunakan oleh orang lain untuk dijadikan alat perencanaan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

1. pertama; pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna maka, jika dilihat dari duduk perkaranya seseorang yang di jadikan sebagai Perangkat Desa pastinya adalah orang yang sehat jiwa dan fisiknya seperti halnya ketentuan sebagai Kepala Desa, sebab itu tentunya Kepala Desa menunjuk seseorang untuk menjadi asisten Perangkat Desa pastinya yang sehat secara jasmani dan rohani karena sebagai orang yang menjalankan perbuatan sesuai dengan apa yang di perintahkan maka unsur tidak

sehat pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna tidak dapat dibenarkan bagi Asisten Kepala Desa.

2. Kedua; Perbuatannya karena adanya paksaan, jika dilihat dari latar permasalahan tidak ada unsur pemaksaan sebab asisten Perangkat Desa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan tugasnya untuk membantu dalam pengurusan pembuatan akta lahir.
3. Ketiga; perbuatannya karena disesatkan, jika asisten Perangkat Desa dikaitkan dengan ini tentu tidak dibenarkan sebab peristiwa kelahiran anak korban telah menjadi asumsi publik sehingga masyarakat yang bertempat tinggi di wilayah tersebut mengetahui dengan betul dan sudah diperjelas oleh pihak keluarga korban perihal yang dimaksudkan dan yang diinginkan.

Seseorang yang ikut dalam perbuatan pidana (*madepleger*) merupakan orang yang dengan sengaja ikut berbuat tindak pidana untuk membuat berhasil melakukan aksinya pelaku. Untuk mengetahui kualitas masing-masing peserta ikut serta/tidaknya maka dalam diperinci sebagai berikut:

- (1) Dalam tindakannya memenuhi rumusan delik pidana
- (2) Dalam tindakannya memenuhi salah satu dari rumusan delik pidana
- (3) Dalam tindakannya memenuhi sebagian dari rumusan delik pidana

Pembantu atau biasa di kenal *madeplichtige* sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP terdiri dari:

ketika tindak pidana kejahatan dilakukan, seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat itu. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, hal ini dilakukan pada saat sebelum tindak pidana itu dilakukan seseorang memberikan penjelasan, kesempatan serta sarana (alat-alat) hal ini bisa melalui pengaruh maupun sumbangan terhadap terwujudnya perbuatan tindak pidana pokok, misalkan menjadi orang yang menyemangati maupun orang yang memberikan instruksi bahwasannya dalam keadaan menjamin seseorang bahwasannya perbuatannya aman atau tidak aman. Hal ini terlihat ketika pelaku berhasil melakukan tindak pidana, sebab ketika tindak pidana yang dilakukan mengalami kegagalan tentunya mengakibatkan seseorang yang ikut dalam pelaksanaan tindak pidana dapat diketahui (Kuhp and others 2019).

Selain hal itu seseorang bisa di pertanggung jawabkan perbuatannya apabila dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang disinggung sebelumnya, apabila dirinci bahwasannya perbuatan itu harus terjadi akibat dari kesalahan yang dilakukan (schuld) oleh si pembuat. Perbuatannya dianggap salah atau termasuk tindak pidana apabila dalam melakukan tindakan tersebut disertai dengan niat sehingga perbuatannya dapat dipidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana tanpa didasari oleh niat sebelumnya atau bisa dikatakan perbuatan yang spontan terjadi, maka seseorang tersebut tidak dapat dipenuhinya unsur kesalahannya sehingga dengan sendirinya ia dapat dipidana.

Menurut wirjono prodjodikoro Kesalahan terbagi menjadi 2 macam, adapun kesalahannya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana (opzet)
- b. Kurang hati-hati dalam bertindak sehingga perbuatannya menyeleweng ke perbuatan tindak pidana (culpa)

Selain itu Kepala Desa/Perangkat Desa dikenakan sanksi mengenai pelanggaran terhadap kode etik sebagai Kepala Desa. dalam Pasal 6 kode etik dari Pemerintah Desa dalam bernegara yaitu harus melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan bekerja secara jujur, tanggap, terbuka dan bijaksana dalam melaksanakan program Pemerintah dengan bersikap jujur dalam memberikan sebuah kesaksian dalam peristiwa dokumen penting milik warga desanya. hal ini dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam kode etik aparat Pemerintah Desa, sebab dalam permasalahan yang ada tindakan pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam keadaan sadar, dan mengetahui secara jelas fakta yang sebenarnya dan sengaja dimanipulasikan agar memperoleh akta kelahiran secara mudah.

Adapun sanksi pidana terkait dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa dapat dikenakan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14. Sebagaimana dalam Pasal 12,13,14 ini Perangkat Desa yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi moral berupa pemberitahuan bahwasannya ia melakukan pelanggaran dalam bekerja di desa dan yang berhak memberikan sanksi moral yaitu pejabat yang berwenang dalam keputusan sidang majelis dalam keputusan yang diberikan berupa sanksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka apabila penyampaianya dilakukan secara tertutup maka cukup

dihadiri oleh pejabat yang memiliki kewenangan akan hal itu yaitu atasan dari terlapor dan pelapor dan apabila sidangnya bersifat terbuka maka keputusannya dilakukan pada saat upacara bendera dalam acara resmi pegawai dan ditempelkan di papan pengumuman desa. Selain hal itu dalam pengenaan sanksi moral harus terdapat surat pernyataan yang di tulis/disampaikan oleh pihak terkait bahwasannya dalam tindakan yang dilakukannya terdapat suatu penyesalan dan disertai dengan permohonan maaf. Selain tindakannya yang dilakukan berupa pelanggaran kode etik biasanya juga terjadi pelanggaran disiplin maka terdapat hukuman disiplin berupa teguran secara lisan maupun tertulis atau bahkan terberat bisa diberi sanksi pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% (Etik and Pemerintah 2017).

Bentuk jaminan negara terhadap perlindungan status anak akibat pemerkosaan

Bentuk jaminan negara terhadap perlindungan status anak akibat pemerkosaan hanya berupa perlindungan anak secara konvensional, diantaranya seperti halnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban anak, pengakuan dan pengesahan status anak, pemeliharaan anak dan lain-lain. Hukum memberikan sebuah perlindungan bagi anak luar kawin di indonesia meliputi, perlindungan dari negara terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan melalui pengesahan dan pembuktian berupa tes DNA . sebagaimana dalam hal ini sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Putusan MK ini yang menyatakan bahwasannya anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi hal itu dibenarkan menurut hukum melalui pembuktian berupa tes DNA. Hal ini setidaknya dapat memberi ruang bagi anak untuk mendapatkan sebuah keadilan yang sebelumnya mungkin tidak memiliki hak akan hal ini.

Perlindungan anak termasuk anak luar kawin, diantaranya yaitu berupa hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, juga ikut serta dalam berkehidupan sosial dengan masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai umat manusia, selanjutnya negara memberikan hak anak untuk mendapatkan identitas dan serta mendapatkan kewarganegaraan, negara memberikan jaminan agar anak mengetahui siapa orang tuanya dari anak tersebut. Pada hakikatnya hukum harus memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung dalam kehidupannya yang tak lain yaitu termasuk anak diluar kawin sebab

tidak ada seorangpun yang menginginkan menjadi anak dari akibat pemerkosaan sehingga anak mendapatkan sanksi sosial berupa penglabelan status anak tidak sah.

Hukum memberikan solusi agar anak diluar perkawinan mendapatkan hak-hak penuh selayaknya pada anak sah, yaitu dengan mengganti status anak melalui proses pengesahan anak, kedua orang tua anak harus mengakui bahwasannya anak tersebut merupakan anak biologisnya. Hal ini dibutuhkan dari keduanya sebab hubungan keperdataan anak dengan ibu biologisnya sudah terikat dengan sendirinya sedangkan hubungan dengan ayahnya harus dilakukan sebuah pengesahan anak. Dalam pengakuan anak harus dilakukan secara ikhlas dan tanpa adanya unsur pemaksaan, pengancaman dll. Karena hukum tidak mengikat tentang keharusan untuk pengakuan anak tersebut. Hanya sebagian anak yang beruntung mendapatkan sebuah pengesahan berupa pengakuan dari ayah biologisnya dan apabila ayah biologisnya tidak mengakui maka anak luar kawin tetap hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga dari ibunya.

Ketidakberhasilan negara untuk memperjuangkan status anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya merupakan hutang negara terhadap anak. Oleh karena itu negara menjamin kepada kehidupan masyarakatnya yang tak lain terhadap korban pemerkosaan dan anak, negara menyejahterakan kehidupan masyarakatnya agar hidup dengan sejahtera lahir dan batin serta hidup yang layak. Seperti halnya pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial berupa pemulihan jiwanya dari peristiwa yang ia alami.

Macam-macam hak anak luar kawin akibat pemerkosaan secara garis besar bentuk perlindungan terhadap anak terbagi menjadi dua pengertian yang berbeda sebagaimana sebagai berikut:

1. Perlindungan negara dari dalam meliputi:
 - a. Kepentingan umum
 - b. Kepentingan pribadi
2. Perlindungan negara dari luar meliputi:
 - a. kerjasama
 - b. kesehatan, dan
 - c. pendidikan

Kepastian hukum terhadap kelahiran anak diluar perkawinan yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah peristiwa lain selain rasa trauma, kekerasan fisik dll. Terdapat juga korban yang tak jarang terjadi kehamilan, kehamilan korban tentunya menjadi beban berat bagi korban sebab pilihannya antara tetap melahirkan dan merawat anak tersebut atau memilih untuk melakukan aborsi terhadap kandungannya hal tersebut sebagai upaya dari Pemerintah untuk mengurangi sedikit beban yang diderita oleh korban. Kepastian hukum lainnya yaitu apabila korban tetap memilih untuk mempertahankan kandungannya maka wajib bagi negara untuk membuatkan akta kelahiran anak korban tindak pidana kejahatan seksual yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang sebagaimana hal ini merupakan akta kelahiran yang memiliki kekuatan yang nyata sehingga orang lain tidak dapat menyangkalnya. Akta catatan sipil memberikan status terhadap mereka yang memiliki kepentingan akan hal itu. Akta catatan sipil memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang sebagaimana di terbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil. Adapun manfaat dari kepastian hukum akta kelahiran anak untuk melindungi keberadaan anak dalam segi perlindungan hukum untuk terhindar dari adanya perbuatan jahat seseorang berupa perdagangan manusia, pernikahan dini,dll. Akta kelahiran dapat memberikan hak kewarisan dari keluarga yang terikat karena akta kelahiran merupakan bukti yang sempurna perihal apa yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut.

Selain itu kepastian hukum dalam akta otentik/ akta kelahiran dapat memberikan arah atau panduan bahwasannya usia sebenarnya anak berapa, dan anak dapat dikatakan dewasa atau tidaknya, berakhirnya nafkah orang tua terhadap anaknya dan berakhirnya hak perwalian setelah perkawinan dapat dilihat dari akta kelahiran anak. Bulan, tahun, jam dan tempat dan tanggal lahir seseorang. Jenis kelamin, pekerjaan dari orang tua anak. Tujuan ini untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, artinya melakukan atau memenuhi persyaratan seolah-olah benar, padahal palsu. Hal ini apabila diberikan contoh sebagai berikut:

Seorang anak yang terlahir dari ibu A dan bapak B namun dalam pencatatan kelahiran anak tertulis bahwasannya anak tersebut terlahir dari ibu C dan bapak D jadi tidak ada kesamaan

dalam hal nyata dengan akta kelahiran. Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan manusia yang melakukan penyeludupan hukum

Buku yang dijadikan pedoman dalam pencatatan sipil di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh PBB mengungkap bahwasannya fungsi pencatatan sipil, yaitu sebagai berikut:

1. untuk memberikan status untuk orang
2. mempertahankan, melindungi hak asasi manusia
3. fungsi statistik.

Pencatatan sipil bertujuan agar seseorang mendapatkan sebuah kepastian berupa status hukum, sedangkan dari administrasi kependudukan memberikan tujuan untuk mengatur hal penting masalah kependudukan sehingga warga bernegara secara tertib hukum. Oleh karena itu, maka pencatatan sipil harus menjadi hal penting dari administrasi kependudukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015).

Perlindungan hukum sebagai upaya untuk menghindari perbuatan manusia kepada manusia lainnya dengan sewenang-wenangnya. Tidak ada manusia yang boleh mendiskriminasi seseorang karena seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat tentunya menginginkan sebuah kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum maka masyarakat dapat hidup secara tertib seperti halnya kasus pemalsuan identitas/data dalam akta otentik berupa akta kelahiran tidak dapat terulang kembali minimal dapat mengurangi perbuatan tersebut.

Keberadaan anak diakui pertama kali oleh negara apabila ia telah melakukan pendaftaran kelahiran anak dalam pencatatan kelahiran anak. Sedangkan kelahiran seorang anak yang tidak terdaftar/tercatat maka anak tersebut kelahirannya tidak diakui oleh negara sebab akta lahir diumpakan sebagai tiket, tiket adalah bukti bahwasanya telah ada pencatatan sebelumnya dalam dokumen penting untuk dapat diketahui keberadaan anak dan mengakses fasilitas negara seperti halnya bantuan pendidikan, layanan kesehatan dll. Maka oleh karena itu agar anak memiliki ruang untuk dapat memiliki hak sebagaimana dalam hal mendapatkan sebuah perlindungan sebagai bagian dari suatu Negara.

Fungsi lain dari adanya pencatatan kelahiran anak yaitu untuk setiap perbuatan manusia dapat diketahui oleh negara sehingga pencatatan kelahiran dapat mengamankan

pengakuan diri dari setiap warga masyarakat di hadapan hukum secara sama. Pemberian identitas penting sebagai pembeda. Manfaat pencatatan kelahiran selain yang diuraikan diatas ternyata masih banya lagi seperti halnya:

- a. faktanya masyarakat masih belum terlalu mengetahui bahwa akta lahir anak sebagai bukti terhadap umur anak, penentuan usia ini bisa diketahui dari akta kelahiran anak sehingga anak dengan secara jelas terbaca berapa usia anak agar anak terhindar dari tindakan yang merugikan anak seperti pekerja buruh anak, pernikahan dini, dan bahkan perdagangan manusia.
- b. Namun yang secara jelas manfaat dari pembuatan Akta Kelahiran anak yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya anak yang lahir merupakan putra/putri dari orang tua atas nama siapa dan selain untuk mengetahui asal-usulnya, sebagai bukti yang berkekuatan hukum apabila dikemudian hari anak menuntut hak-haknya dalam keluarga.
- c. Dan untuk manfaat bagi Pemerintah dan juga anak pada umumnya akta kelahiran anak dapat dijadikan sebagai perangkat dasar agar dapat mengetahui Pemerintah bekerja secara efisien dalam tindakannya guna menyejahterakan kehidupan anak, seperti halnya menyekolahkan anak, fasilitas kesehatan yang ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakatnya.

Tujuan utama dibentuknya aturan tentunya agar masyarakat dapat keadilan serta hukum wajib untuk melihat apakah aturannya telah sesuai dengan fakta yang terjadi oleh anak baik dilihat dari aturan Undang-Undang maupun program pemerintah lainnya apakah telah menjamin dan memenuhi hak anak. Oleh karena itu maka negara harus menyusun rencana yang simple untuk perlindungan anak. Sehingga anak bisa menikmati fasilitas dari anggaran negara sebagai pemenuhan hak dasar berupa pencatatan kelahiran anak dalam akta kelahiran. Hak untuk mendapatkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari, hidup dengan masyarakat dilingkungan sekitar, Perencanaan yang dilakukan ini untuk menjamin sebuah keadilan bagi anak dan kesehatan anak maupun kesetaraan bagi anak dalam hal seperti turut serta dalam berpendapat dilingkungan masyarakat, untuk mengkontrol, dan agar anak dapat merasakan manfaat dari pembangunan negara, perencanaan yang di bentuk dengan

mempertimbangkan gambaran, kebutuhan serta permasalahan dan pengalaman baik bagi anak yang menjadi korban dari akibat tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- (1) Akibat Hukum dalam pemalsuan identitas anak dalam Akta Otentik maka hal yang diterima oleh anak (korban) perihal Hukum Kewarisan dan tanggung jawab hukum lainnya seperti halnya berubahnya nasab anak kepada orang lain. Dan akibat hukum bagi keluarga korban (kakak) dikenakan Pasal 266 KUHP akibat dari tindakannya yang menyuruh anak (korban) untuk memakai atau menggunakan Akta Otentik palsu. Hal ini tentunya dikenakan Pidana Penjara paling lama Tujuh Tahun. Dan dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 277 ayat (1) KUHP karena telah sengaja menggelapkan asal usul orang dengan Pidana Penjara paling lama Enam Tahun. Dan selain itu berlaku juga Sanksi Pidana bagi Perangkat Desa dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP disebut sebagai pelaku tunggal sebab apabila ia tidak mengiyakan permintaan klien/keluarga korban maka Tindak Pidana pemalsuan identitas anak tidak akan terjadi selain itu Perangkat Desa dikenakan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan point huruf h karena memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar hal yang sengaja dimanipulasi agar memperoleh Akta Kelahiran secara mudah.
- (2) Jaminan Negara terhadap status anak akibat pemerkosaan maka Hukum Pidana memberikan jaminan berupa keadilan bagi anak melalui penegakan hukum dengan cara memberikan Sanksi Pidana berupa Pemidanaan, hukum memberikan jaminan perlindungan hukum berupa Perlindungan Anak secara konvensional seperti halnya pemenuhan hak dan kewajiban anak untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan status anak, pemeliharaan dan lain sebagainya seperti mendapatkan Hak Keperdataan dari ayah biologisnya, kasih sayang dan juga nafkah. Hal ini bisa diwujudkan apabila secara sah terbukti melalui tes DNA hasil tersebut menunjukkan bahwa memang benar ayah yang ditunjuk merupakan ayah biologis anak, disertai keputusan hakim yang

memutuskan secara hukum dibenarkan hasil tes DNA tersebut dan terdapat pula pengakuan dari ayah biologis anak, pengakuan tersebut tidak boleh disertai dengan ancaman . Hal ini memberikan sedikit peluang keadilan bagi anak namun apabila ayah biologis anak tidak memberikan pengakuan padahal telah terbukti secara sah hasil tes DNA menunjukkan bahwa ia ayah biologisnya maka tentunya dapat diberikan Sanksi Pidana Denda atau Pidana Penjara sesuai dengan Keputusan Undang-Undang yang berlaku. Namun tujuan dari Negara bukan tentang pemidanaan terhadap pelaku tetapi tujuan utamanya untuk memberikan jaminan terhadap anak korban dan apabila jaminan status anak tidak terpenuhi maka dianggap sebagai sebuah hutang Negara dan untuk melunasi hutang Negara terhadap anak korban dengan cara melalui jaminan pemeliharaan anak dan menjamin Kesehatan, Pendidikan dll.

DAFTAR PUSTAKA

- dolot A. Bakung. 2017. *Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan*
- Hermawati, Risa. 2020. 'Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)', *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2.2: 160–77 <<https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2112>>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. 'Pencatatan Kelahiran Sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, Dan Pembuktian Hak-Hak Anak', *Riskesdas 2018*, 3: 103–11
- Lahati, Nurlian M, and Zulkarnain Suleman. 2020. 'Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan', 1.1: 116–26
- Lestari, Meilan. 2017. 'Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan', *UIR Law Review*, 1.02: 183–90
- P, Muhammad Roy, and Mahkamah Konstitusi. 2012. 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH BERDASARKAN MASHLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam) Abstract ', XII.1: 85–108
- Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, and others. 2019. 'Lembaran Negara'
- Pratama, Teo Dentha Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. 'Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.2: 191–96 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196>>
- Rachman, Tahar. 2018. 'METODE PENELITIAN', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 10–27
- Sangki, Agio V. 2012. 'KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN', *Lex Crimen*: 33–47
- Undang-Undang Nomor 17, 2016. 2016. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang': 1–90
Yenny AS. 2018. 'UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK Yenny AS Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak'